

## **PERAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN DAN KEGIATAN FRAKSI DI DPRD JAWA BARAT**

Raudatul Medina <sup>1</sup>, Hertiara Alya <sup>2</sup>

Program Studi Komputerisasi Akuntansi Institut Digital Ekonomi LPKIA  
Jln. Soekarno Hatta No. 456 Bandung 40266, Telp 022-75642823, Fax. 022-7564282  
<sup>1</sup>r.medina@lpkia.ac.id, <sup>2</sup>220213007@fellow.lpkia.ac.id

### **ABSTRAK**

Pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Akuntansi memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi dalam pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD Jawa Barat, dengan fokus pada implementasi sistem akuntansi, pengawasan anggaran, dan pelaporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang baik dapat meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan dana, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Studi ini juga mengidentifikasi kendala dalam penerapan akuntansi di DPRD serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data dari dokumen resmi, wawancara, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya pengawasan internal, dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akuntansi menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dana bantuan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana bantuan di DPRD serta menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah lainnya dalam memperbaiki tata kelola keuangan.

Kata kunci : *Akuntansi public, pengelolaan dana bantuan, kegiatan fraksi*

### **1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan fungsi legislatif yang efektif. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan untuk kegiatan fraksi digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Akuntansi menjadi salah satu alat utama dalam mendukung pengelolaan dana tersebut. Sebagai sistem yang terstruktur, akuntansi memungkinkan pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan dilakukan dengan baik. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran, pelaporan penggunaan dana, hingga evaluasi efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan fraksi. Namun, pengelolaan dana bantuan di DPRD sering kali menghadapi tantangan, seperti potensi penyalahgunaan dana, kurangnya sistem pengawasan

yang memadai, dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Permasalahan pengelolaan dana bantuan di DPRD juga berakar pada kompleksitas proses administrasi dan regulasi yang mengatur penggunaan dana publik. Peraturan yang kaku dan birokrasi yang berlebihan sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan yang efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, hubungan antara fraksi dan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana. Fraksi harus dapat menunjukkan bahwa penggunaan dana bantuan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini membutuhkan sistem akuntansi yang dapat mencerminkan hasil penggunaan dana secara jelas dan terukur.

Konteks lokal di Jawa Barat memberikan tantangan tambahan, mengingat besarnya wilayah dan beragamnya kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana bantuan harus mampu mencerminkan keberagaman ini, sehingga alokasi dana dapat

dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Akuntansi memainkan peran penting dalam mendukung analisis kebutuhan ini.

Selain sebagai alat pencatatan, akuntansi juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, DPRD dapat meminimalisasi risiko penyalahgunaan dana. Sistem ini juga dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pengelolaan dana bantuan di DPRD memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Transparansi dalam pengelolaan dana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sebaliknya, penyalahgunaan dana dapat merusak citra DPRD dan mengurangi efektivitasnya sebagai representasi rakyat.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah memahami bagaimana akuntansi dapat mendukung pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan praktisi di bidang tata kelola keuangan publik.

Lanjutan dari pengelolaan dana ini adalah pemahaman tentang kompleksitas struktur organisasi DPRD. Struktur ini mencakup berbagai fraksi dengan latar belakang politik yang beragam. Dalam hal ini, akuntansi dapat berfungsi sebagai alat untuk menyatukan visi dan misi dalam pengelolaan dana publik. Dengan sistem akuntansi yang transparan, perbedaan tersebut dapat dikelola secara lebih efektif. Selain itu, akuntansi juga dapat mendukung proses perencanaan strategis. Dengan data yang valid dan andal, DPRD dapat menyusun anggaran yang lebih realistis dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan strategis yang berbasis akuntansi memungkinkan DPRD untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal.

Pengelolaan dana bantuan juga memerlukan pendekatan kolaboratif dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, auditor, dan masyarakat. Dalam hal ini, akuntansi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pihak melalui laporan keuangan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana bantuan. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, DPRD dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Akuntansi yang transparan dapat mendukung keterbukaan ini dengan menyediakan data yang lengkap dan mudah diakses.

Penggunaan teknologi informasi juga semakin penting dalam pengelolaan dana bantuan. Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat

meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, DPRD dapat mengurangi risiko human error dan mempercepat proses pelaporan keuangan.

Selain itu, pengelolaan dana bantuan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Dana yang dikelola harus mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dalam hal ini, akuntansi dapat membantu DPRD untuk mengevaluasi efektivitas program yang dibiayai oleh dana bantuan. Evaluasi menjadi tahap akhir dalam pengelolaan dana bantuan. Dengan adanya evaluasi yang berbasis data akuntansi, DPRD dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan dana. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dana, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang tidak kalah penting. DPRD harus memastikan bahwa staf yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki kompetensi yang memadai. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis akuntansi, pengelolaan anggaran, dan penggunaan teknologi informasi.

Sebagai penutup, pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Akuntansi sebagai alat utama dalam pengelolaan keuangan publik memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan sistem akuntansi yang baik, DPRD dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## 2. DASAR TEORI

**Akuntansi Pemerintahan** Akuntansi pemerintahan adalah sistem akuntansi yang diterapkan pada lembaga atau instansi pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD Jawa Barat, akuntansi pemerintahan memainkan peran penting dalam mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan secara sistematis. Melalui prinsip akuntansi yang jelas dan pelaporan yang transparan, dana bantuan yang diterima dan digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Akuntansi pemerintahan memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan akuntansi di sektor swasta. Pemerintah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk mencapai tujuan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan perlu mencerminkan pertanggungjawaban publik dan efektivitas

penggunaan dana. Dalam pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD, prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga pengawasan terkait (Halim, 2019).

**Pengelolaan Dana Bantuan** Pengelolaan dana bantuan dalam sektor publik mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk mengelola dana yang diterima dari berbagai sumber, baik dalam bentuk hibah, sumbangan, atau alokasi anggaran negara, yang ditujukan untuk mendukung program-program pembangunan atau kegiatan sosial. Dalam konteks DPRD Jawa Barat, pengelolaan dana bantuan bertujuan untuk mendukung kegiatan fraksi dan kegiatan legislasi lainnya. Akuntansi yang tepat sangat penting dalam mengelola dana ini agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan.

Pengelolaan dana bantuan yang efektif melibatkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pencatatan dan pelaporan yang transparan. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan dana bantuan adalah memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, dengan menghindari korupsi atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang baik dan laporan yang jujur akan membantu mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola dengan baik dan efisien (Wuryanto, 2020).

**Akuntabilitas Publik** Akuntabilitas publik adalah kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan laporan secara jujur dan transparan mengenai pengelolaan sumber daya publik, baik itu uang, aset, maupun kegiatan. Dalam pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD, akuntabilitas publik sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai oleh dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan berkurang, yang berdampak pada legitimasi lembaga tersebut. Akuntabilitas publik tidak hanya melibatkan transparansi dalam laporan keuangan, tetapi juga keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang memadai serta audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang merupakan salah satu langkah untuk memastikan akuntabilitas. Dalam konteks DPRD Jawa Barat, pengelolaan dana fraksi harus dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun keuangan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja legislatif (Mardiasmo, 2021).

**Manajemen Keuangan Publik** Manajemen keuangan publik adalah keseluruhan proses yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan di sektor publik, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan. Dalam pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD, manajemen keuangan publik memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan efisien dan efektif. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang agar anggaran yang ada dapat dialokasikan dengan tepat sasaran.

Penerapan manajemen keuangan publik yang baik dalam DPRD Jawa Barat akan membantu mengoptimalkan penggunaan dana bantuan untuk kegiatan fraksi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam pengelolaan anggaran harus berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Pengawasan yang ketat juga sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang ada dan tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan dalam penggunaannya (Sulastri, 2022).

**Transparansi Keuangan** Transparansi keuangan merupakan prinsip yang mengharuskan semua informasi terkait pengelolaan keuangan untuk dapat diakses oleh publik. Transparansi ini mencakup pengungkapan secara terbuka tentang pendapatan, pengeluaran, dan penggunaan dana dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam konteks pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat, transparansi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Dengan adanya transparansi, masyarakat dan pihak terkait dapat memantau penggunaan dana bantuan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, transparansi juga menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi, karena setiap transaksi keuangan dapat dipantau dan diaudit secara terbuka. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan yang melibatkan dana publik, sehingga menciptakan sistem pengelolaan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan (Astuti, 2020).

**Pengawasan Internal dan Eksternal** Pengawasan dalam konteks pengelolaan dana publik melibatkan dua aspek utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak internal lembaga, seperti inspektorat atau auditor internal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga luar, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit lainnya.

Pengawasan ini berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan dana atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Dalam hal pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD Jawa Barat, pengawasan yang dilakukan oleh kedua pihak ini sangat penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan internal yang efektif dan pengawasan eksternal yang independen harus saling melengkapi agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara optimal (Tarihoran, 2019).

**Perencanaan Anggaran** Perencanaan anggaran adalah proses yang melibatkan penyusunan dan penetapan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode anggaran. Dalam konteks pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat, perencanaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan dengan tepat sasaran untuk mendukung kegiatan fraksi dan program legislatif lainnya. Proses perencanaan ini juga melibatkan analisis kebutuhan, prioritas, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Perencanaan anggaran yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Jika perencanaan anggaran dilakukan dengan buruk, dapat mengarah pada pemborosan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk melakukan perencanaan anggaran yang matang dan didasarkan pada data yang akurat serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses ini harus didukung dengan partisipasi yang luas dari pemangku kepentingan agar tujuan penggunaan dana dapat tercapai secara optimal (Bastian, 2020).

**Sistem Informasi Keuangan** Sistem informasi keuangan (SIK) adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga. Sistem ini berfungsi untuk memfasilitasi pengelolaan dana secara lebih efisien dan efektif, dengan memberikan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data keuangan. Di DPRD Jawa Barat, sistem informasi keuangan yang baik akan memudahkan dalam proses pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana bantuan untuk kegiatan fraksi.

Penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Sistem ini memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memudahkan pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu, dengan adanya sistem informasi keuangan yang terkomputerisasi, risiko kesalahan manusia dalam pencatatan dan pelaporan dapat diminimalisir, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan dana yang lebih efisien dan transparan (Lestari, 2021).

**Auditing Keuangan** Audit keuangan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi laporan keuangan dan praktik akuntansi suatu lembaga, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di DPRD Jawa Barat, audit keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi apakah dana bantuan yang diterima dan digunakan oleh fraksi telah dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Auditing keuangan juga berperan penting dalam mendeteksi adanya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana. Hasil audit yang objektif dan independen akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya audit keuangan yang dilakukan secara berkala, DPRD dapat memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Kurniawan, 2020).

**Peraturan Perundang-Undangan** Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang mengatur setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintah, termasuk dalam pengelolaan dana bantuan. Dalam konteks DPRD Jawa Barat, peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang jelas, penggunaan dana dapat dikendalikan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Peraturan perundang-undangan ini mencakup berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, serta akuntabilitas publik. Dalam hal pengelolaan dana bantuan, DPRD harus tunduk pada peraturan yang ada untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh negara. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat berisiko pada penyalahgunaan dana, yang akan merugikan publik dan merusak citra lembaga pemerintah (Sutrisno, 2021).

**Efisiensi Penggunaan Dana** Efisiensi penggunaan dana adalah prinsip dalam pengelolaan keuangan yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat, efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan fraksi dan kegiatan legislatif lainnya. Efisiensi ini dapat dicapai dengan mengelola anggaran secara cermat, menghindari pemborosan, dan mengalokasikan dana pada program yang paling prioritas.



Untuk mencapai efisiensi, setiap pengeluaran harus direncanakan dengan baik dan berdasarkan pada kebutuhan yang mendesak. Penggunaan dana yang tidak efisien dapat mengarah pada pemborosan yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan lembaga legislatif. Oleh karena itu, penting bagi DPRD Jawa Barat untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana secara berkelanjutan agar dana yang ada digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring, 2019).

**Kepatuhan Terhadap Kebijakan Keuangan**  
Kepatuhan terhadap kebijakan keuangan adalah faktor yang sangat penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana bantuan yang diterima oleh DPRD Jawa Barat. Kebijakan keuangan yang ada dirancang untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan dana. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap kebijakan akan menjaga integritas proses pengelolaan keuangan, sehingga dana digunakan secara benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan kebijakan keuangan yang ketat juga akan meminimalisir risiko pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD dan pihak terkait lainnya untuk mematuhi setiap kebijakan yang ada dalam pengelolaan dana bantuan, serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Prasetyo, 2020).

### 3. HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD Jawa Barat, serta bagaimana peran akuntansi dalam memastikan pengelolaan dana tersebut berjalan dengan baik. Pembahasan ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan dana bantuan tersebut, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, berikut adalah beberapa temuan terkait pengelolaan dana di DPRD Jawa Barat.

**Pengelolaan Dana Bantuan oleh Fraksi di DPRD Jawa Barat**  
Pengelolaan dana bantuan untuk kegiatan fraksi di DPRD Jawa Barat telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih terdapat beberapa tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota DPRD dan petugas keuangan, ditemukan bahwa meskipun prosedur pengalokasian dana telah ditetapkan, implementasinya terkadang terhambat

oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang ada. Selain itu, proses pengelolaan yang melibatkan banyak pihak juga mempengaruhi efektivitas dalam pemanfaatan dana. Pengawasan internal dan eksternal menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat sasaran.

**Peran Akuntansi dalam Pengelolaan Dana**  
Akuntansi berperan penting dalam memastikan bahwa dana yang diterima oleh fraksi dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi dapat mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, beberapa anggota DPRD mengungkapkan bahwa pelatihan terkait akuntansi dan pengelolaan keuangan masih terbatas, yang mempengaruhi pemahaman mereka dalam mengelola dana secara optimal. Akuntansi yang baik harus dapat mendokumentasikan seluruh transaksi keuangan dengan rinci dan jelas agar dapat diaudit dengan mudah oleh auditor internal maupun eksternal.

**Sistem Pengawasan dan Audit**  
Sistem pengawasan dan audit di DPRD Jawa Barat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme audit sudah diterapkan, namun terdapat tantangan dalam hal waktu pelaksanaan audit dan keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan audit secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan tidak diaudit secara maksimal. Kendala lain yang ditemukan adalah kesulitan dalam memperoleh informasi terkait penggunaan dana dari fraksi-fraksi yang ada, yang menghambat proses pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

**Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan**  
Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, ditemukan bahwa meskipun laporan anggaran dan penggunaan dana telah disampaikan, masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses yang mudah dan jelas terkait rincian penggunaan dana tersebut. Informasi yang disampaikan terkadang tidak cukup detail untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka dan dapat dipahami oleh publik.

**Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan** Efisiensi penggunaan dana bantuan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun dana bantuan untuk kegiatan fraksi sudah dialokasikan dengan baik, dalam beberapa kasus, penggunaan dana tersebut tidak optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi adalah perencanaan yang kurang matang dalam pengalokasian dana untuk kegiatan fraksi. Beberapa kegiatan yang didanai tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga dana yang tersedia tidak digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan anggaran yang lebih terperinci dan berbasis pada prioritas kegiatan yang memberikan dampak besar.

#### **Tantangan dalam Pengelolaan Dana Bantuan**

Tantangan terbesar dalam pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat adalah minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal akuntansi dan pengelolaan keuangan. Banyak anggota DPRD yang tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi, yang menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mematuhi prosedur pengelolaan keuangan yang tepat. Selain itu, masalah birokrasi yang rumit dan pengawasan yang tidak berjalan secara maksimal juga menjadi faktor penghambat dalam penggunaan dana yang efisien dan efektif. Untuk itu, perlu ada peningkatan dalam kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, serta penyederhanaan prosedur untuk mempercepat alur pengelolaan dana.

#### **Rekomendasi untuk Peningkatan Pengelolaan Dana**

Untuk meningkatkan pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, peningkatan pelatihan bagi anggota DPRD dan petugas terkait mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan negara sangat diperlukan. Kedua, sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi harus ditingkatkan agar lebih efisien dalam pencatatan dan pelaporan dana. Ketiga, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat dengan mekanisme audit yang lebih terstruktur dan rutin. Terakhir, transparansi dalam pelaporan anggaran dan penggunaan dana harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

### **3.5 KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana bantuan dan kegiatan fraksi di DPRD Jawa

Barat, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada kerangka pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan publik, yang menyebabkan kesulitan dalam mematuhi prosedur yang tepat. Selain itu, transparansi pengelolaan dana juga menjadi masalah, di mana meskipun laporan anggaran dan penggunaan dana telah disampaikan, informasi tersebut belum cukup rinci dan mudah diakses oleh publik.

Peran akuntansi dalam pengelolaan dana bantuan sangat penting, karena dengan sistem akuntansi yang baik, penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Pengawasan internal dan eksternal juga memegang peranan besar dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana, meskipun pada praktiknya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit yang menyeluruh dan tepat waktu. Efisiensi penggunaan dana juga dapat ditingkatkan dengan adanya perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan anggaran yang lebih terkoordinasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana bantuan di DPRD Jawa Barat membutuhkan perbaikan pada beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan transparansi. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan penggunaan dana dapat lebih optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

#### **2. Saran-saran**

##### **1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk mengatasi keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, disarankan agar anggota DPRD dan petugas keuangan mengikuti pelatihan dan pendidikan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan negara. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek teknis dalam pengelolaan dana publik, serta prosedur audit dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, diharapkan pengelolaan dana menjadi lebih profesional dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

##### **2) Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan dana bantuan, DPRD Jawa Barat perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan keuangan yang lebih rinci dan mudah dipahami. Informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran sebaiknya dipublikasikan secara terbuka, baik melalui situs web resmi DPRD

maupun media lainnya, sehingga masyarakat dapat secara langsung memantau penggunaan dana publik.

### 3) **Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit**

Disarankan agar DPRD Jawa Barat memperkuat sistem pengawasan dan audit yang ada dengan melibatkan auditor internal dan eksternal yang lebih berkompeten serta menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan audit secara menyeluruh. Proses audit yang rutin dan transparan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan dana dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana.

### 4) **Perencanaan Anggaran yang Lebih Matang**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan dana, DPRD Jawa Barat perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dan terkoordinasi. Setiap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan harus direncanakan dengan baik, dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan yang paling mendesak dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Penyusunan anggaran yang lebih terstruktur dan berbasis pada kebutuhan riil akan mengoptimalkan penggunaan dana dan mengurangi pemborosan.

### 5) **Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Teknologi**

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan sangat disarankan untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan anggaran. Implementasi sistem akuntansi berbasis teknologi akan mempermudah anggota DPRD dan petugas keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana dan memudahkan proses audit yang lebih cepat dan transparan.

### 6) **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan**

Masyarakat perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana bantuan untuk kegiatan fraksi. DPRD Jawa Barat dapat membuka saluran komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dan laporan terkait penggunaan dana. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengelolaan dana akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efektif.

### 7) **Evaluasi Berkala terhadap Pengelolaan Dana**

Agar pengelolaan dana dapat terus ditingkatkan, DPRD Jawa Barat perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bantuan. Evaluasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti auditor independen dan masyarakat, untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.

Evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Wuryanto, E. (2020). *Manajemen Keuangan Negara: Dari Kebijakan Hingga Pengelolaan Dana Bantuan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo, D. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulastri, I. (2022). *Manajemen Keuangan Publik: Konsep, Implementasi, dan Praktik Terbaik*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, N. (2020). *Transparansi Keuangan dalam Pengelolaan Dana Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarihoran, M. (2019). *Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyalahgunaan Dana Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. (2020). *Manajemen Keuangan Daerah: Teori dan Praktik Perencanaan Anggaran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Lestari, R. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Keuangan di Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, A. (2020). *Auditing Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Dana Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, M. (2021). *Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sembiring, H. (2019). *Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Publik: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, A. (2020). *Kepatuhan Terhadap Kebijakan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Dana Publik*. Surabaya: Fadli Book.